



P U T U S A N

Nomor 320/Pdt.G/2016/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Herman bin Lakolo, umur 60 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Poros palu Donggala, RT.01/RW.01, Kelurahan Kabonga Besar, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala., selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Bahria Binti Arif Iapena, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di BTN Gonenggati RT.03/RW.04, Kelurahan Kabonga Besar, Kecamatan Banawa, kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan Termohon serta keterangan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Membaca surat permohonan Pemohon tanggal 24 Nopember 2016 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Donggala, kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor 320/Pdt.G/2016/PA Dgl. tanggal 24 Nopember 2016 yang berisi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 1996, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 17_halaman_Putusan No.262/Pdt.G/2016/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, dan sebagaimana ternyata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.22.2.1/PW.01/86/2014 tanggal 07 Mei 2014;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di kediaman di rumah kakak Termohon di Desa Balukang II Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala selama kurang lebih 1 Minggu dan selanjutnya tinggal di rumah orang tua Pemohon kurang lebih 6 bulan. Selanjutnya tinggal di rumah sendiri di Jln. Trans Sulawesi Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala kurang lebih 4 tahun 8 bulan sebagai tempat kediaman bersama terakhir kemudian pada awal bulan Desember 2014 Termohon pulan dan menetap di rumah orang tuanya sebagaimana alamat tersebut di atas, kemudian Pemohonpun di rumah sendiri bersama anak kandung Pemohon sebagaimana alamat tersebut di atas;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai keturunan yang bernama Zulfikar Rafih Bin Sudirman umur 5 tahun kini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon;

4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Maret 2014 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Bahwa Termohon setiap kali ada masalah dengan Pemohon (bertengkar) Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon sebagai suami Termohon;
- b. Bahwa Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai Kepala Rumah Tangga yang mana jika Pemohon menasehati Termohon, Termohon bukannya menerima masukan dari Pemohon tapi malah balik memarahi Pemohon;
- c. Bahwa Termohon sering bersama laki-laki lain;
- d. Bahwa Termohon tidak menyukai Pemohon;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Desember 2014, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah /pisah

Hal. 2 dari 17_ halaman_Putusan No. 262/Pdt.G/2016/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Donggala c.q. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim memeriksa identitas Pemohon dan Termohon, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon menjawab sesuai dengan apa yang ada di dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa pada persidangan tanggal 9 Januari 2017 dan tanggal 23 Januari 2017 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir sehingga Majelis Hakim melanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara, lalu

Hal. 3 dari 17_ halaman_Putusan No. 262/Pdt.G/2016/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang oleh Pemohon tetap pada susbtansi permohonannya semula;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban dan tahap pembuktian, karena Termohon secara berturut-turut sebanyak dua kali tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 150/20/VI/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala tanggal 10 Juni 2010, yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Majelis Hakim lalu diberi tanda kode P.;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi, setelah diambil identitasnya dan disumpah, lalu memberikan keterangan secara terpisah masing-masing sebagai berikut:

1. Mansyur bin Alwi, umur 64 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Batusuya, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai Saksi I Pemohon;

Bahwa saksi I Pemohon di hadapan sidang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 4 dari 17_ halaman_Putusan No. 262/Pdt.G/2016/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, penyebab Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar karena Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon, Termohon juga sering berboncengan dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun enam bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon masih sering memberi nafkah kepada Termohon dan anaknya berupa beras;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha merukunkan kembali bahkan Pemohon sudah tiga kali menjemput Termohon untuk kembali lagi, namun Termohon sudah tidak mau;

2. Firman bin Siding, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun V Desa Balukang II, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai Saksi II Pemohon;

Bahwa saksi II Pemohon di hadapan sidang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak memasuki usia perkawinan dua tahun, antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa setahu saksi, penyebab Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar karena Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon dan tidak mau mendengar nasihat Pemohon, Termohon juga sering pergi bersama laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon;

Hal. 5 dari 17_ halaman_Putusan No. 262/Pdt.G/2016/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 lalu;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon masih sering memebri nafkah kepada Termohon dan anaknya berupa beras;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasihati agar rukun kembali, namun Termohon sudah tidak mau;

Bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut secara berturut-turut sebanyak dua kali untuk menghadap di pengadilan namun tidak hadir, selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ke tahap kesimpulan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tidak ada lagi alat-alat bukti yang akan diajukan dan tidak ada juga keterangan yang akan disampaikan lagi, dan Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya semula, dan Pemohon memohon agar perkara ini diputuskan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk segala hal ihwal dalam persidangan telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang beragama Islam yang mengajukan permohonan cerainya, berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, sehingga berdasarkan Keputusan Presiden RI. Nomor 85 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama Palu, yang

Hal. 6 dari 17_ halaman_Putusan No. 262/Pdt.G/2016/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Kabupaten Donggala, Jo. penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan oleh karenanya Pengadilan Agama Donggala berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan memberikan saran kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya Majelis hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan proses mediasi oleh Mediator Drs Samsudin, S.H., Hakim Pengadilan Agama Donggala, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 13 Desember 2016 bahwa proses mediasi yang telah dilaksanakan oleh mediator tersebut tidak berhasil, dengan demikian usaha Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), jo. Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk tahap pemeriksaan pokok perkara, lalu persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang oleh Pemohon tetap pada substansi permohonannya semula, dan terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban dan tahap pembuktian, karena Termohon secara berturut-turut sebanyak dua kali tidak hadir di persidangan, sebagaimana telah dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali hidup rukun dan damai dengan Termohon, serta tidak melanjutkan permohonan Pemohon, akan tetapi tidak

Hal. 7 dari 17_ halaman_Putusan No. 262/Pdt.G/2016/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, oleh karenanya telah terpenuhi maksud Pasal 65 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat-alat bukti kepada Pemohon, sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Pemohon untuk membuktikan permohonannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْتَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Pemohon, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Termohon";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P., serta telah menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P., yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309

Hal. 8 dari 17_ halaman_Putusan No. 262/Pdt.G/2016/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reglement Buiteegewesten (R.Bg.), maka kesaksian para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim memeriksa apakah Pemohon mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan (*Legal Standing*) atas perkara ini. Berdasarkan keterangan para saksi dalam persidangan, serta alat bukti P., sehingga dengan alat-alat bukti tersebut berdasarkan Pasal 284 *Reglement Buiteegewesten (R.Bg.)*, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (*baca Peraturan*) Menteri Agama RI. Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap posita angka 1 (satu) permohonan Pemohon telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada hari Kamis, 10 Juni 2010, di Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, dan oleh karenanya Pemohon telah memiliki *Legal Standing* (Kapasitas) untuk mengajukan permohonan cerai *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut secara berturut-turut sebanyak dua kali untuk menghadap di pengadilan namun tidak hadir, sehingga Majelis hakim memiliki alasan yang kuat untuk menyatakan bahwa Termohon tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban dan pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan di persidangan, dikuatkan pula oleh keterangan saksi II Pemohon yang saling bersesuaian bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian tinggal di rumah sendiri, serta awal-awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon dijalani dengan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak, sehingga terhadap posita angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan di persidangan, dikuatkan pula oleh keterangan saksi II Pemohon yang saling bersesuaian bahwa sejak bulan Mei tahun 2014, rumah tangga antara

Hal. 9 dari 17_ halaman_Putusan No. 262/Pdt.G/2016/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon dan tidak mau mendengar nasihat Pemohon, Termohon juga sering pergi bersama laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga terhadap posita angka 4 (empat) permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan di persidangan, dikuatkan pula oleh keterangan saksi II Pemohon yang saling bersesuaian Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi, sehingga terhadap posita angka 5 (lima) permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan di persidangan, dikuatkan pula oleh keterangan saksi II Pemohon yang saling bersesuaian bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan desember 2014, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi, dan sudah pernah dirukunkan antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga terhadap posita angka 6 (enam) permohonan Pemohon, oleh Majelis Hakim harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Panjar Biaya perkara dari Pemohon, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga terhadap posita angka 7 (tujuh) permohonan Pemohon, oleh Majelis Hakim harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Hal. 10 dari 17_ halaman_Putusan No. 262/Pdt.G/2016/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada tanggal 10 Juni 2010, di Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa sejak bulan Mei tahun 2014, ketentraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon dan tidak mau mendengar nasihat Pemohon, Termohon juga sering pergi bersama laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa sudah pernah dirukunkan Pemohon agar tetap kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon dan tidak mau mendengar nasihat Pemohon, Termohon juga sering pergi bersama laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014, Pemohon tetap di rumah bersama, sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Sioyong, dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi, dan sudah pernah dirukunkan Pemohon agar tetap kembali dengan Termohon,

Hal. 11 dari 17_ halaman_Putusan No. 262/Pdt.G/2016/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil, oleh Majelis Hakim telah mengkualifisir, sehingga telah berkeyakinan kuat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, serta sudah tidak satu atap lagi/serumah maka perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa salah satu pihak (Termohon) telah meninggalkan pihak lain selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari Pemohon dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian, lebih baik tidak dilanjutkan dan tidak dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (baca Peraturan) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justru Allah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masing-masing di antara keduanya, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Nisaa' ayat 130 sebagai berikut:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya:

"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan Dia adalah Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana";

Hal. 12 dari 17_ halaman_Putusan No. 262/Pdt.G/2016/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan tahap konstituir terhadap pertimbangan-pertimbangan di atas, sehingga Majelis hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jis. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, walaupun usaha mendamaikan tidak berhasil, serta oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri, dan telah didengarkan keterangan dari orang-orang dekat Pemohon, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka terhadap angka 1 (satu) petitum primair permohonan Pemohon, oleh Majelis Hakim dalam permusyawaratan telah sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), hal mana dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak;

Hal. 13 dari 17_ halaman_Putusan No. 262/Pdt.G/2016/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rasa kebencian antara Pemohon dan Termohon merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan antara Pemohon dengan Termohon yang telah sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21;

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah (*broken marriage*) yang terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak dapat dirukunkan lagi, hal ini didasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

د رء المفاصد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Hal. 14 dari 17_ halaman_Putusan No. 262/Pdt.G/2016/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum pernah bercerai, sehingga Majelis Hakim mempunyai alasan yang cukup kuat untuk menyatakan bahwa mengizinkan Pemohon (**Sudirman bin Siding**) untuk mengikrarkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Rahmawati binti Najamuddin**);

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primair permohonan Pemohon, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 15 dari 17_ halaman_Putusan No. 262/Pdt.G/2016/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Herman bin Lakilo**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Bahria binti Arif Lapena**) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulakhir 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Amar Ma'ruf, S.Ag. M.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim dan **Rustam, S.HI., M.H** serta **Ruhana Faried, S.HI., M.HI** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Shiyamus Shidqi, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Rustam, S.HI, M.H

Amar Ma'ruf, S.Ag. M.H.,

Ruhana Faried, S.HI., M.HI

Panitera Pengganti,

Hal. 16 dari 17_ halaman_Putusan No. 262/Pdt.G/2016/PA Dgl.



Shiyamus Shidqi, S.H.I.,M.H.I

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 100.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 6.000,00 |

Jumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17_ halaman_Putusan No. 262/Pdt.G/2016/PA Dgl.